|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L****AMPIRAN I** | **:** | **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI** | | |
|  |  | NOMOR | : |  |
|  |  | TANGGAL | : |  |

Tata cara pengolahan data dan informasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Jenis data dan informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui:

1. Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD.
2. Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya.

Analisis Kondisi Umum Daerah.

Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam analisis kondisi umum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya yaitu:
   1. Hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya untuk menyusun RPJPD periode berikutnya;
   2. Hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya untuk menyusun RPJMD periode berikutnya.
2. Memiliki hubungan/keterkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
4. Menggunakan formula/rumus penghitungan baku terhadap obyek tertentu;
5. Melihat trend (kecenderungan);
6. Menggunakan metode regresi linier atau metode lainnya; dan/atau
7. Menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek tertentu.
8. Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan cara:
9. Perbandingan antar waktu;
10. Perbandingan dengan standar yang berlaku (nasional/internasional); dan/atau
11. Perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya.

Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

1. Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah.

Data dan informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup:

* + - 1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

1. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
   1. Luas dan batas wilayah administrasi
   2. Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
      * + 1. Posisi astronomis
          2. Posisi geostrategis
          3. Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:

Pedalaman

Terpencil

Pesisir

Pegunungan

Kepulauan

* 1. Topografi, antara lain terdiri dari:
     1. Kemiringan lahan
     2. Ketinggian lahan
  2. Geologi, antara lain terdiri dari:
     1. Struktur dan karakteristik
     2. Potensi kandungan
  3. Hidrologi, antara lain terdiri dari:
     1. Daerah Aliran Sungai
     2. Sungai, danau dan rawa
     3. Debit
  4. Klimatologi, antara lain terdiri dari:
     1. Tipe
     2. Curah hujan
     3. Suhu
     4. Kelembaban
  5. Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
     1. Kawasan budidaya
     2. Kawasan lindung

1. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

1. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Hasil analisis geografis dapat disajikan dalam bentuk tabel.

* + - 1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam Tabel.T-I.A.1.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.



ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | RUMUS |
| --- | --- | --- |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | |
| Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | |
|  | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | |
|  | Pertumbuhan PDRB | Dimana:  +1 = tahun pengamatan PDRB  = tahun pengamatan PDRBsebelumnya |
|  | Laju inflasi provinsi | Dimana :  = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya  = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.  Sedangkan dihitung dengan rumus sebagai berikut :  Dimana :  = nilai inflasi pada tahun n  = nilai pada 1 tahun berikutnya  = tahun ... |
|  | PDRB per kapita |  |
|  | Indeks Gini | dimana:  Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i  Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i  Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:   * G < 0,3 = ketimpangan rendah * 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang * G > 0,5 = ketimpangan tinggi |
|  | Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia | Dimana:  YD4 = Persentase pendapatan yang  diterima oleh 40 % penduduk  lapisan bawah  Qi -l = Persentase kumulatif pendapatan  ke i-1  Pi = Persentase kuraulatif penduduk  ke i  qi = Persentase pendapatan ke i |
|  | Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | Dimana:  Untuk kabupaten/kota:  Yi = PDRB perkapita di kecamatan I  Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota  Fi = jumlah penduduk di kecamatan i  n = jumlahpenduduk di kab/kota  Untuk provinsi  Yi = PDRB perkapita di kab/kota i  Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi  fi = jumlah penduduk di kab/kota i  n = jumlah penduduk di provinsi |
|  | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan | (100 – angka kemiskinan) |
|  | Angka kriminalitas yang tertangani |  |
| Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | |
|  | Pendidikan | |
|  | Angka melek huruf | dimana:  = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahunkeatas) pada tahun t  = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t  = Jumlah penduduk usia 15 tahunkeatas |
|  | Angka rata-rata lama sekolah | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. |
|  | Angka partisipasi kasar | Dimana,  h = jenjang pendidikan  a = kelompok usia  t = tahun  = adalah jumlah penduduk yang pada tahun tdari berbagai usia sedangsekolah pada jenjang pendidikan h  = adalah jumlah penduduk yang pada tahun tberada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h |
|  | Angka pendidikan yang ditamatkan | Dimana:  h = jenjang pendidikan  t = tahun  = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t  = total jumlah penduduk pada tahun t |
|  | Angka Partisipasi Murni | dimana:  h = jenjang pendidikan  a = kelompok usia  t = tahun  = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t  = jumlah penduduk kelompok usia a |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A |  |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B |  |
|  | Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C |  |
|  | Kesehatan | |
|  | Angka kelangsungan hidup bayi | Dimana:  1 = per 1000 kelahiran  AKB      = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)  = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.  ∑LahirHidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. |
|  | Angka usia harapan hidup | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur |
|  | Persentase balita gizi buruk |  |
|  | Pertanahan | |
|  | Persentase penduduk yang memiliki lahan | Penduduk memiliki lahan x100 Jumlah penduduk |
|  | Ketenagakerjaan |  |
|  | Rasio penduduk yang bekerja |  |
| Fokus Seni Budaya dan Olahraga | | |
|  | Kebudayaan | |
|  | Jumlah grup kesenian | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk |
|  | Jumlah gedung | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. |
|  | Pemuda dan Olahraga | |
|  | 1. Jumlah klub olahraga | Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. |
|  | 1. Jumlah gedung olahraga | Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. |
|  |  |  |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | |
| Fokus Layanan Urusan Wajib | | |
|  | Pendidikan | |
|  | Pendidikan dasar: |  |
|  | Angka partisipasi sekolah | dimana:  h = jenjang pendidikan  a = kelompok usia  t = tahun  = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t  = jumlah penduduk kelompok usia a |
|  | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah |  |
|  | Rasio guru/murid |  |
|  | Rasio guru/murid per kelas rata-rata |  |
|  | Pendidikan menengah: |  |
|  | Angka partisipasi sekolah |  |
|  | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah |  |
|  | Rasio guru terhadap murid |  |
|  | Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata |  |
|  | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) |  |
|  | Fasilitas Pendidikan: |  |
|  | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik |  |
|  | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik |  |
|  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): |  |
|  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |  |
|  | Angka Putus Sekolah: |  |
|  | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI |  |
|  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs |  |
|  | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA |  |
|  | AngkaKelulusan: |  |
|  | Angka Kelulusan (AL) SD/MI |  |
|  | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs |  |
|  | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA |  |
|  | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs |  |
|  | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA |  |
|  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV |  |
|  | Kesehatan | |
|  | Rasio posyandu per satuan balita |  |
|  | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk |  |
|  | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk |  |
|  | Rasio dokter per satuan penduduk |  |
|  | Rasio tenaga medis per satuan penduduk |  |
|  | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani |  |
|  | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan |  |
|  | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) |  |
|  | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan |  |
|  | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA |  |
|  | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD |  |
|  | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin |  |
|  | Cakupan kunjungan bayi |  |
|  | Cakupan puskesmas |  |
|  | Cakupan pembantu puskesmas |  |
|  | PekerjaanUmum | |
|  | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik |  |
|  | Rasio Jaringan Irigasi |  |
|  | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk |  |
|  | Persentase rumah tinggal bersanitasi |  |
|  | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk |  |
|  | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk |  |
|  | Rasio rumah layak huni |  |
|  | Rasio permukiman layak huni |  |
|  | Panjang jalan dilalui Roda 4 |  |
|  | Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) |  |
|  | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) |  |
|  | Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) |  |
|  | Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar |  |
|  | Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar |  |
|  | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat |  |
|  | Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota |  |
|  | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik |  |
|  | Lingkungan Pemukiman |  |
|  | Perumahan |  |
|  | Rumah tangga pengguna air bersih |  |
|  | Rumah tangga pengguna listrik |  |
|  | Rumah tangga ber-Sanitasi |  |
|  | Lingkungan pemukiman kumuh |  |
|  | Rumah layak huni |  |
|  | Penataan Ruang | |
|  | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB |  |
|  | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan |  |
|  | Ruang publik yang berubah peruntukannya |  |
|  | Perencanaan Pembangunan |  |
|  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada/ tidak |
|  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | Ada/ tidak |
|  | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada/ tidak |
|  | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD |  |
|  | Perhubungan | |
|  | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.  Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah |
|  | Rasio ijin trayek |  |
|  | Jumlah uji kir angkutan umum | Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan |
|  | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis |
|  | Angkutan darat |  |
|  | Kepemilikan KIR angkutan umum |  |
|  | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | Jangka waktu proses pengujian angkutan umum |
|  | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum |
|  | Pemasangan Rambu-rambu |  |
|  | Lingkungan Hidup | |
|  | Persentase penanganan sampah |  |
|  | Persentase Penduduk berakses airminum |  |
|  | Persentase Luas pemukiman yang tertata |  |
|  | Pencemaran status mutu air |  |
|  | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air |  |
|  | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. |  |
|  | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk |  |
|  | Penegakan hukum lingkungan |  |
|  | Pertanahan |  |
|  | Persentase luas lahan bersertifikat |  |
|  | Penyelesaian kasus tanah Negara |  |
|  | Penyelesaian izin lokasi |  |
|  | Kependudukan dan Catatan Sipil | |
|  | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk |  |
|  | Rasio bayi berakte kelahiran |  |
|  | Rasio pasangan berakte nikah |  |
|  | Kepemilikan KTP |  |
|  | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk |  |
|  | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada/tidak ada |
|  | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/belum |
|  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
|  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah |  |
|  | Partisipasi perempuan di lembaga swasta |  |
|  | Rasio KDRT |  |
|  | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur |  |
|  | Partisipasi angkatan kerja perempuan |  |
|  | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan |  |
|  | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | |
|  | Rata-rata jumlah anak per keluarga |  |
|  | Rasio akseptor KB |  |
|  | Cakupan peserta KB aktif |  |
|  | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I |  |
|  | Sosial | |
|  | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah. |
|  | PMKS yg memperoleh bantuan sosial |  |
|  | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial |  |
|  | Ketenagakerjaan | |
|  | Angka partisipasi angkatan kerja |  |
|  | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun |  |
|  | Tingkat partisipasi angkatan kerja |  |
|  | Pencari kerja yang ditempatkan |  |
|  | Tingkat pengangguran terbuka |  |
|  | Keselamatan dan perlindungan |  |
|  | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah |  |
|  | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |
|  | Persentase koperasi aktif |  |
|  | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM | Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM |
|  | Jumlah BPR/LKM | Jumlah BPR/LKM aktif |
|  | Usaha Mikro dan Kecil |  |
|  | Penanaman Modal | |
|  | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) |
|  | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) |
|  | Rasio daya serap tenaga kerja |  |
|  | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) |  |
|  | Kebudayaan | |
|  | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya |
|  | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya |
|  | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan |  |
|  | Kepemudaan dan Olahraga | |
|  | Jumlah organisasi pemuda | Jumlah organisasi pemuda |
|  | Jumlah organisasi olahraga | Jumlah organisasi olahraga |
|  | Jumlah kegiatan kepemudaan | Jumlah kegiatan kepemudaan |
|  | Jumlah kegiatan olahraga | Jumlah kegiatan olahraga |
|  | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) |  |
|  | Lapangan olahraga |  |
|  | Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri | |
|  | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM,  Ormas dan OKP |
|  | Kegiatan pembinaan politik daerah | Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah |
|  | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | |
|  | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk |  |
|  | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk |  |
|  | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan |  |
|  | Pertumbuhan ekonomi |  |
|  | Kemiskinan | (100 – angka kemiskinan) |
|  | Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah | Ada tidak |
|  | Penegakan PERDA |  |
|  | Cakupan patroli petugas Satpol PP | Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam |
|  | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten |  |
|  | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten |  |
|  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten |  |
|  | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) |  |
|  | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik |  |
|  | Sistim Informasi Manajemen Pemda | Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs |
|  | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda |
|  | Ketahanan Pangan | |
|  | Regulasi ketahanan pangan | Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. |
|  | Ketersediaan pangan utama |  |
|  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
|  | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) |  |
|  | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK |  |
|  | Jumlah LSM | Jumlah LSM yang aktif |
|  | LPM Berprestasi |  |
|  | PKK aktif |  |
|  | Posyandu aktif |  |
|  | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat |  |
|  | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat |  |
|  | Statistik | |
|  | Buku ”kabupaten dalam angka” | Ada/Tidak |
|  | Buku ”PDRB kabupaten” | Ada/Tidak |
|  | Kearsipan | |
|  | Pengelolaan arsip secara baku |  |
|  | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM  pengelola kearsipan |
|  | Komunikasi dan Informatika |  |
|  | Jumlah jaringan komunikasi |  |
|  | Rasio wartel/warnet terhadap penduduk |  |
|  | Jumlah surat kabar nasional/lokal | Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah |
|  | Jumlah penyiaran radio/TV lokal | Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah |
|  | Web site milik pemerintah daerah | Ada/Tidak |
|  | Pameran/expo | Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun |
|  | Perpustakaan | |
|  | Jumlah perpustakaan | Jumlah perpustakaan |
|  | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun |  |
|  | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah |  |
| Fokus Layanan Urusan Pilihan | | |
|  | Pertanian | |
|  | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar |  |
|  | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB |  |
|  | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB |  |
|  | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB |  |
|  | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB |  |
|  | Cakupan bina kelompok petani |  |
|  | Kahutanan | |
|  | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis |  |
|  | Kerusakan Kawasan Hutan |  |
|  | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB |  |
|  | Energi dan Sumber Daya Mineral | |
|  | Pertambangan tanpa ijin |  |
|  | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB |  |
|  | Pariwisata | |
|  | Kunjungan wisata |  |
|  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB |  |
|  | Kelautan dan Perikanan | |
|  | Produksi perikanan |  |
|  | Konsumsi ikan |  |
|  | Cakupan bina kelompok nelayan |  |
|  | Produksi perikanan kelompok nelayan |  |
|  | Perdagangan | |
|  | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB |  |
|  | Ekspor Bersih Perdagangan | nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor |
|  | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal |  |
|  | Perindustrian | |
|  | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB |  |
|  | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri |  |
|  | Pertumbuhan Industri. |  |
|  | Cakupan bina kelompok pengrajin |  |
|  | Ketransmigrasian | |
|  | Transmigran swakarsa |  |
|  | Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB |  |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | |
| Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | |
|  | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | |
|  | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita |  |
|  | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita |  |
|  | Produktivitas total daerah |  |
|  | Pertanian | |
|  | Nilai tukar petani |  |
| Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur | | |
|  | Perhubungan |  |
|  | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan |  |
|  | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum |
|  | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun |
|  | Penataan Ruang | |
|  | Ketaatan terhadap RTRW |  |
|  | Luas wilayah produktif |  |
|  | Luas wilayah industri |  |
|  | Luas wilayah kebanjiran |  |
|  | Luas wilayah kekeringan |  |
|  | Luas wilayah perkotaan |  |
|  | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | |
|  | Jenis dan jumlah bank dan cabang | Jumlah dan jenis bank dan cabang- cabangnya |
|  | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang | Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya |
|  | Jenis, kelas, dan jumlah restoran | Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas |
|  | Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel | Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas |
|  | Lingkungan Hidup | |
|  | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih |  |
|  | Komunikas dan Informatika | |
|  | Rasio ketersediaan daya listrik |  |
|  | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik |  |
|  | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon |  |
| Fokus Iklim Berinvestasi | | |
|  | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | |
|  | Angka kriminalitas |  |
|  | Jumlah demo | Jumlah demo dalam 1 tahun |
|  | Lama proses perijinan | Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari) |
|  | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah |
|  | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha |
|  | Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa |  |
| Fokus Sumber Daya Manusia | | |
|  | Ketenagakerjaan | |
|  | Rasio lulusan S1/S2/S3 |  |
|  | Rasio ketergantungan |  |

Berikut ini akan diuraikan dan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi yang dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan formula yang tercantum dalam Tabel.T-I.A.1.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau mensleleksi data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

1. Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah.

Beberapa contoh tata cara pengolahan data dan informasi kondisi umum daerah terkait dengan indikator kinerja pembangunan daerah mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi
2. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Rumus menghitung pertumbuhan PDRB:

*Dimana:*

+1 = tahun pengamatan PDRB

= tahun pengamatan PDRB sebelumnya

Hasil analisis pertumbuhan PDRB, selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....

Atas Dasar Harga Konstan Tahun .....

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Sektor | (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pertambangan & Penggalian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Industri Pengolahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Listrik,Gas & Air bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstruksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jasa-jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....

Atas Dasar Harga Berlaku

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Sektor | (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pertambangan & Penggalian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Industri Pengolahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Listrik,Gas & Air bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstruksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jasa-jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Sektor | (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pertambangan & Penggalian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Industri Pengolahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Listrik,Gas & Air bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstruksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jasa-jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

dan harga Konstan (Hk) Tahun ..... sampai dengan Tahun...

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Sektor | Pertumbuhan | |
| Hb | Hk |
| % | % |
| 1 | Pertanian |  |  |
| 2 | Pertambangan & Penggalian |  |  |
| 3 | Industri Pengolahan |  |  |
| 4 | Listrik,Gas & Air bersih |  |  |
| 5 | Konstruksi |  |  |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran |  |  |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi |  |  |
| 8 | Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan |  |  |
| 9 | Jasa-jasa |  |  |
|  | PDRB |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

1. Laju inflasi provinsi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH).

Sedangkan kondisi sebaliknya, dimana harga-harga pada umumnya turun, disebut deflasi.

Angka inflasi dan deflasi disajikan hanya pada tingkat provinsi. Sajikan data inflasi 5 (lima) tahun yang lalu, dan hitung rata-rata pertumbuhannya dalam tabel sebagai berikut:

Nilai inflasi rata-rata Tahun.... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) | Rata-rata pertumbuhan |
| Inflasi |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rumus menghitung rata-rata pertumbuhan Inflasi:

Dimana :

= perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya

= adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.

Sedangkan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Dimana :

= nilai inflasi pada tahun n

= nilai pada 1 tahun berikutnya

= tahun ...

Uraikan hasil analisis terhadap perubahan dan laju inflasi.

1. PDRB per kapita

PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

Rumus menghitung PDRB perkapita:

Sajikan hasil penghitungan PDRB perkapita dalam tabel sebagai berikut:

PDRB Perkapita Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| Nilai PDRB (Rp) |  |  |  |  |  |
| Jumlah Penduduk (jiwa) |  |  |  |  |  |
| PDRB perkapita (Rp/jiwa) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Indeks Gini/Koefiesien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

Kurva Lorenz Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)



\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Kurva *Lorenz* adalah titik potong antara persentase kumulatif jumlah rumah tangga (penduduk) dan persentase kumulatif total pendapatan.
2. Kurva lorenz memberikan gambaran persentase penduduk yang menerima Q persen pendapatan
3. Jika kuva lorenz mendekati diagonal OA → pendapatan semakin merata, karena nilai G semakin kecil
4. Jika G mendekati nol → distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk.

Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio:

1. Jumlah rumah tangga atau penduduk
2. Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Interval | | | | | | | |
| <100rb | 100-149,9rb | 150-199,9rb | 200-299,9rb | 300-499,9rb | 500-749,9rb | 750-999,9rb | >1jt |
| Rata-rata pengeluaran kapita per bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total pengeluaran seluruh penduduk sebulan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proporsi penduduk (persen) Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kumulatif proporsi penduduk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proporsi pengeluaran (persen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proporsi kumulatif total pengeluaran (persen) Qi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qi+Qi-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pi(Qi+Qi-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gini Ratio |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rumus untuk menghitung gini ratio:



dimana:

Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

* G < 0,3 = ketimpangan rendah
* 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang
* G > 0,5 = ketimpangan tinggi

1. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:

* 1. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
  2. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
  3. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Rumus untuk menghitung pemerataan pendapatan versi Bank Dunia:

Dimana:

YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah

Qi -l = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1

Pi = Persentase kumulatif penduduk ke i

qi = Persentase pendapatan ke i

1. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di suatu provinsi dalam waktu tertentu.

Rumus menghitung Indeks ketimpangan Williamson :

Dimana:

Untuk tingkat kabupaten/kota

Yi = PDRB perkapita di kecamatan I

Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota

fi = jumlah penduduk di kecamatan i

n = jumlah penduduk di kab/kota

Untuk tingkat provinsi

Yi = PDRB perkapita di kab/kota i

Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi

fi = jumlah penduduk di kab/kota i

n = jumlah penduduk di provinsi

1. Kesejahteraan Sosial
2. Pendidikan
   1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Cara menghitung angka melek huruf dengan rumus:

dimana:

 = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t

 = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun t

 = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Sajikan data angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas, jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas |  |  |  |  |  |
| 3 | Angka melek huruf |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Melek Huruf Tahun .... menurut kabupaten/kota

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas | Angka melek huruf |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas |  |  |  |  |  |
| 3 | Angka melek huruf |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Melek Huruf Tahun .... menurut Kecamatan

Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Kecamatan | Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas | Angka melek huruf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kecamatan... |  |  |  |
| 2 | Kecamatan... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* 1. Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi *kelebihan estimasi* atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Cara menghitung angka rata-rata lama sekolah:

Lamanya bersekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang, misalnya jika seseorang pendidikan tertingginya adalah SMP kelas 2, maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 8 tahun, yaitu 6 tahun bersekolah di tingkat SD ditambah dengan 2 tahun di SMP. Untuk memudahkan perhitungan, dapat digunakan tabel konversi sebagai berikut:

##### Lamanya Bersekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas

| Jenjang | Kelas | Jumlah tahun bersekolah  (kumulatif) |
| --- | --- | --- |
| SD | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 |
|  | 5 | 5 |
|  | 6 | 6 |
| SMP | 1 | 7 |
|  | 2 | 8 |
|  | 3 | 9 |
| SMA | 1 | 10 |
|  | 2 | 11 |
|  | 3 | 12 |
| Diploma | I | 13 |
|  | II | 14 |
|  | III | 15 |
| S1 | I | 13 |
|  | II | 14 |
|  | III | 15 |
|  | IV | 16 |
| S2 |  | 17 – 19 |
| S3 |  | 20-24 |

Untuk Diploma, S1, S2, dan S3, konversi lamanya bersekolah dapat berbeda untuk setiap individu karena asumsi yang digunakan dalam konversi diatas adalah sebagai berikut:

Seseorang yang masuk S1 adalah lulusan SMA, bukan melanjutkan dari diploma. Dalam kenyataannya, terdapat program S1 extension yang membuka kesempatan bagi lulusan Diploma untuk melanjutkan studi ke S1.

Asumsi menempuh pendidikan S2 maksimum adalah 3 tahun dan S3 maksimum adalah 4 tahun.

Sedangkan untuk rata-rata jumlah tahun bersekolah di tingkat kabupaten, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

dimana :

 = adalah rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk usia 5 tahun keatas

 = adalah jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun keatas

= adalah jumlah penduduk usia 5 tahun keatas.

Contoh:

Bila diketahui tiga individu A, B, dan C menurut jenjang dan kelas sekolah tertinggi yang pernah di tamatkan, seperti pada contoh dibawah ini :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Individu | Jenjang | Kelas/tingkat | Lama sekolah (tahun) |
|  | A | SMP | 2 | 8 |
|  | B | SD | 6 (tamat) | 6 |
|  | C | Universitas | 2 | 14 |
| Jumlah | 3 |  |  | 28 |

Angka rata-rata lama sekolah :

9,33

Nilai rata-rata lamanya bersekolah yang besar menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Jika didapat rata-rata lamanya sekolah sama dengan 9,33 artinya rata-rata penduduk di suatu wilayah bersekolah sampai 9 tahun 4 bulan atau setingkat SLTP.

* 1. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Cara menghitung APM:

dimana:

*h* = jenjang pendidikan

*a* = kelompok usia

*t* = tahun

 = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

 = jumlah penduduk kelompok usia a

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

SD/MI = 7-12 tahun

SMP/MTs = 13-15 tahun

SMA/MA/SMK = 16-18 tahun

Sajikan data angka partisipasi murni untuk 5 tahun terakhir , dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Perkembangan APM Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | APM SD/MI |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | APM SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 3 | SMA/MA/SMK |  | | | | |
| 3.1. | jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |
| 3.2. | jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun |  |  |  |  |  |
| 3.3. | APM SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |

Angka Partisipasi Murni Tahun .... menurut kabupaten/kota

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten  /Kota | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | |
| jumlah siswa usia  7-12 th bersekolah di SD/MI | jumlah penduduk usia 7-12 th | APM | jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs | Jumlah penduduk usia 13-15 th | APM | jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/ SMK | jumlah penduduk usia 16-18th | APM |
| 1 | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | APM SD/MI |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | APM SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 3 | SMA/MA/SMK |  | | | | |
| 3.1. | jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |
| 3.2. | jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun |  |  |  |  |  |
| 3.3. | APM SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Partisipasi Murni Tahun .... menurut Kecamatan

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | |
| jumlah siswa usia  7-12 th bersekolah di SD/MI | jumlah penduduk usia 7-12 th | APM | jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs | Jumlah penduduk usia 13-15 th | APM | jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/ SMK | jumlah penduduk usia 16-18th | APM |
| 1 | Kecamatan.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Cara Menghitung APK:

Dimana,

*h* = jenjang pendidikan

*a* = kelompok usia

*t* = tahun

  = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h

 = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia a yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

SD/MI = 7-12 tahun

SMP/MTs = 13-15 tahun

SMA/MA/SMK = 16-18 tahun

Sajikan data APK untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | APK SD/MI |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | APK SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 3 | SMA/MA/SMK |  | | | | |
| 3.1. | jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |
| 3.2. | jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun |  |  |  |  |  |
| 3.3. | APK SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun .... menurut kabupaten/kota

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | |
|  |  | jumlah siswa  bersekolah di SD/MI | jumlah penduduk usia 7-12 th | APK | jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs | jumlah penduduk usia 13-15 th | APK | jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/ SMK | jumlah penduduk usia 16-18th | APK |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | APK SD/MI |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | APK SMP/MTs |  |  |  |  |  |
| 3 | SMA/MA/SMK |  | | | | |
| 3.1. | jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |
| 3.2. | jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun |  |  |  |  |  |
| 3.3. | APK SMA/MA/SMK |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Partisipasi Kasar

Tahun .... menurut kecamatan

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | |
| jumlah siswa  bersekolah di SD/MI | jumlah penduduk usia 7-12 th | APK | jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs | jumlah penduduk usia 13-15 th | APK | jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/ SMK | jumlah penduduk usia 16-18th | APK |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* 1. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Cara menghitung APT sebagai berikut:

Dimana:

*h* = jenjang pendidikan

*t* = tahun

= jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan *h* pada tahun t

 = total jumlah penduduk pada tahun *t*

Berikut contoh perhitungan APT:

diketahui jumlah penduduk sejumlah 153.000.000 jiwa, sedangkan penduduk menurut ijazah tertinggi yang pernah ditamatkan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Ijazah Tertingi | Jumlah Penduduk  (jiwa) |
| 1. | SD | 53.000.000 |
| 2. | SMP | 32.000.000 |
| 3. | SMA | 21.000.000 |
| 4. | Perguruan Tinggi | 7.000.000 |
| 5. | Jumlah penduduk | 153.000.000 |

APT SD = (53.000.000/153.000.000) x 100 = 34,64%

APT SMP = (32.000.000/153.000.000) x 100 = 20,92%

APT SMA = (21.000.000/153.000.000) x 100 = 13,73%

APT Perguruan Tinggi = (7.000.000/153.000.000) x 100 = 4,58%

Interpretasi :

Angka APT berkisar antara 0 sampai dengan 100. Dari contoh diatas didapat APT SD adalah 34,64% dan SMP adalah 20,92%. Maka dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar penduduk hanya tamat SD.

Selanjutnya, data APT dapat disajikan dalam tabel berikut:

Untuk kabupaten/kota :

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | APT | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | SD |  |  |  |  |  |
| 2. | SMP |  |  |  |  |  |
| 3. | SMA |  |  |  |  |  |
| 4. | Perguruan Tinggi |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk provinsi :

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)

Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

| NO | APT | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Kabupaten…. |  | | | | |
| I.1. | SD |  |  |  |  |  |
| I.2. | SMP |  |  |  |  |  |
| I.3. | SMA |  |  |  |  |  |
| I.4. | Perguruan Tinggi |  |  |  |  |  |
| II. | Kabupaten…. |  | | | | |
| II.1. | SD |  |  |  |  |  |
| II.2. | SMP |  |  |  |  |  |
| II.3. | SMA |  |  |  |  |  |
| II.4. | Perguruan Tinggi |  |  |  |  |  |
| III. | Kota…. |  | | | | |
| III.1. | SD |  |  |  |  |  |
| III.2. | SMP |  |  |  |  |  |
| III.3. | SMA |  |  |  |  |  |
| III.4. | Perguruan Tinggi |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Catatan:

Bila ingin menggunakan APT untuk perencanaan tenaga kerja,  dapat disamakan dengan jumlah penduduk usia angkatan kerja, misalnya usia 15-64 tahun.

Berikut contoh perhitungan APT:

diketahui jumlah penduduk usia 15-64 tahun menurut ijazah tertinggi yang pernah ditamatkan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Ijazah Tertingi | Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun  (jiwa) |
| 1. | Tidak Berijazah | 20.000.000 |
| 2. | SD | 53.000.000 |
| 3. | SMP | 32.000.000 |
| 4. | SMA | 21.000.000 |
| 5. | Perguruan Tinggi | 7.000.000 |
|  | Jumlah penduduk 15-64 tahun | 133.000.000 |

APT SD = (53.000.000/133.000.000) x 100 = 39,85%

APT SMP = (32.000.000/133.000.000) x 100 = 24,06%

APT SMA = (21.000.000/133.000.000) x 100 = 15,79%

APT Perguruan Tinggi = (7.000.000/133.000.000) x 100 = 5,26%

#### Interpretasi:

Angka APT berkisar antara 0 sampai dengan 100. Dari contoh diatas didapat APT SD adalah 39,85 persen dan SMP adalah 24,06 persen. Maka dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tersedia hanya berpendidikan sampai dengan SD.

1. Kesehatan
   1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, dengan cara sebagai berikut:

Dimana:

1 = per 1000 kelahiran

AKB      = Angka kematian bayi/*Infant Mortality Rate* (IMR)

 = Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.

∑ Lahir Hidup = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Berikut contoh perhitungan AKHB, diketahui jumlah jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dan jumlah kelahiran Hidup pada tahun x, sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabupaten/Kecamatan \*) | Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun x | Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun x | AKB | AKHB |
| Kabupaten/Kecamatan .... | 750 | 21.000 | 36 | 964 |
| Kabupaten/Kecamatan .... | 800 | 25.000 | 32 | 968 |
| Kabupaten/Kecamatan .... | 900 | 43.000 | 21 | 979 |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

Interpretasi:

Apabila AKB nasional = 26 pada tahun x, maka dengan AKB = 36 di kabupaten/kecamatan masih diatas rata-rata nasional atau perlu ditekan seperti melalui program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak.

Contoh perhitungan seperti diatas supaya disajikan dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, untuk mengetahui perkembangan hasil penanggulangan/kebijakan yang telah dilaksanakan mengatasi tingginya AKB dalam suatu wilayah provinsi, kabupaten/kota.

* 1. Angka usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

Contoh:

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk suatu kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk Tahun 1970 adalah 47,7 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52, 2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan Tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir dari Tahun 1970an sampai Tahun 2000, berikut contoh dibawah ini:

Angka Harapan Hidup

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasil Sensus Penduduk | | | | |
| Tahun 1970 | Tahun 1980 | Tahun 1990 | Tahun 2000 | Tahun 2010 |
| 47,7 | 52,2 | 59,8 | 65,5 |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Apabila AHH dibawah angka rata-rata nasional maka diperlukan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

* 1. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

1. rendah = di bawah 10 %
2. sedang = 10-19 %
3. tinggi = 20-29 %
4. sangat tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

1. Kemiskinan.
   1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:

1. Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.
2. Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US $ 1 atau US $ 2 per hari.
3. Kemiskinan Struktural (contoh; kemiskinan karena lokasi yg terisolasi, misal orang mentawai, orang tengger dsb). Adalagi kemiskinan kultural (karena faktor adat) seperti suku badui di cibeo (Banten), suku kubu (Jambi), dayak dan sebagainya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach).* Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Provinsi ......\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daerah/Tahun | Garis Kemiskinan Rph/Kapita/bulan | | | Jumlah penduduk miskin (jiwa) | Persentase penduduk miskin |
| Makanan | Bukan Makanan | Total |  |  |
| Perkotaan |  |  |  |  |  |
| Perdesaan |  |  |  |  |  |
| Kota + Desa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Kepemilikan tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan)

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100.

Selanjutnya perhitungan angka kepemilikan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Persentase Penduduk Memiliki Lahan

Tahun ....sd…..

Provinsi ......

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| Luas Tanah |  |  |  |  |  |
| Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| Jumlah penduduk yang memiliki tanah |  |  |  |  |  |
| Persentase penduduk memiliki tanah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Sedangkan untuk Kabupaten/kota:

Kepemilikan Tanah Tahun ....

Kabupaten/kota......

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kecamatan | Luas Tanah | Jumlah penduduk | Jumlah penduduk yang memiliki tanah | Persentase penduduk memiliki tanah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| Kecamatan... |  |  |  |  |
| Kecamatan... |  |  |  |  |
| Kecamatan... |  |  |  |  |
| Kecamatan... |  |  |  |  |

1. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja *(demand for labour)* adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja *(labour force)* menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran)

Contoh menghitung rasio tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhir ke dalam tabel sebagai berikut:

Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Golongan umur | Angkatan Kerja | | Jumlah |
| Bekerja | Mencari Pekerjaan |
| 15-19 | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
| 20-24 | 11.000 | 1.700 | 12.700 |
| 25-29 | 13.000 | 8.000 | 21.000 |
| 30-34 | 12.000 | 3.100 | 15.100 |
| 35-39 | 11.000 | 1.600 | 12.600 |
| 40-44 | 10.000 | 9.400 | 19.400 |
| 45-49 | 8.000 | 6.300 | 14.300 |
| 50-54 | 6.000 | 4.300 | 10.300 |
| 55-59 | 4.000 | 3.100 | 7.100 |
| 60-64 | 3.000 | 2.600 | 5.600 |
| 65+ | 5.000 | 4.100 | 9.100 |
| Jumlah | 88.000 | 45.700 | 133.700 |

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 66% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 34%nya masih mencari kerja atau pengangguran (1-0,66=0,34).

1. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Angka Kriminalitas

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

Tahun ....

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kasus | Kejadian | Tertangani |
| Pembunuhan | 5 | 4 |
| Penganiayaan Berat | 8 | 6 |
| Penculikan | 4 | 2 |
| Pencurian dengan Kekerasan | 2 | 2 |
| Pencurian dengan Pemberatan | 7 | 6 |
| Pencurian Ranmor | 15 | 13 |
| Pencurian Kawat Telepon | 12 | 10 |
| Pemerkosaan | 2 | 1 |
| Pembakaran | 5 | 4 |
| Senpi/Handak | 9 | 8 |
| Pemerasan | 15 | 14 |
| Penyelundupan | 5 | 4 |
| Kejahatan Terhadap Kepala Negara | 0 | 0 |
| Jumlah | 89 | 74 |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Contoh diketahui jumlah penduduk kabupaten/kota sebesar 200.000 jiwa, maka angka kriminalitas yang tertangani :

Catatan:

Tabel tersebut diatas dapat disajikan dan dianalisis untuk data angka kriminalitas dalam kurun 5 tahun terakhir.

1. Seni Budaya dan olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

* 1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
  2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
  3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
  4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Untuk Provinsi:

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Capaian Pembangunan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. |  |  |  |  |  |
| 3 | Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. |  |  |  |  |  |
| 4 | Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... menurut

kabupaten/kota/Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | Kabupaten/kota | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk | Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk | Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk |
|  | 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |
|  | 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |
|  | 3 | Dst ..... |  |  |  |  |
|  | 4 | Kota .... |  |  |  |  |
|  | 5 | Dst ...... |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Aspek Pelayanan Umum
   1. Fokus Layanan Urusan Wajib
      1. Pendidikan
         1. Pendidikan Dasar
            1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Cara menghitung APS sebagai berikut:

dimana:

*h* = jenjang pendidikan

*a* = kelompok usia

*t* = tahun

= jumlah siswa kelompok usia *a* yang bersekolah di tingkat pendidikan *h* pada tahun *t*

 = jumlah penduduk kelompok usia *a*

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah :

SD/MI = 7-12 tahun

SMP/MTs = 13-15 tahun

Sajikan data APS untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | jumlah murid usia 7-12 thn |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | APS SD/MI |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | jumlah murid usia 13-15 thn |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | APS SMP/MTs |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun .... menurut kabupaten/kota

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
| jumlah murid  usia 7-12 thn | jumlah penduduk usia 7-12 th | APS | jumlah murid usia 13-15 thn | jumlah penduduk usia 13-15 th | APS |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | jumlah murid usia 7-12 thn |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | APS SD/MI |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | jumlah murid usia 13-15 thn |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | APS SMP/MTs |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun .... menurut kecamatan

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
| jumlah murid  usia 7-12 thn | jumlah penduduk usia 7-12 th | APS | jumlah murid usia 13-15 thn | jumlah penduduk usia 13-15 th | APS |
| 1 | Kecamatan.... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan.... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Total |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk menghitung APS menurut jenjang pendidikan:

APS 7-12

APS 13-15

Untuk menghitung APS usia pendidikan dasar:

* + - * 1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Untuk menghitung rasio ketersedian/penduduk usia sekolah dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Rasio |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah .... menurut

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
| Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 7-12 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/kota .....\*)

| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah |  |  |  |  |  |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Rasio |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah |  |  |  |  |  |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Ketersediaan sekolah dan penduduk

usia sekolah menurut kecamatan

Kabupaten/kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
| Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 7-12 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rumus menghitung rasio ketersediaan sekolah menurut jenjang pendidikan dasar:

Rasio Ketersediaan sekolah SD/MI =

Rasio Ketersediaan sekolah SMP/MTs =

Rasio Ketersediaan sekolah pendidikan dasar:

* + - * 1. Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Jumlah Murid |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Rasio |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Jumlah Murid |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

menurut kabupaten/kota

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KABUPATEN/KOTA | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
| Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenjang Pendidikan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | SD/MI |  | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Jumlah Murid |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Rasio |  |  |  |  |  |
| 2 | SMP/MTs |  | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Jumlah Murid |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

menurut Kecamatan

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
| Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rumus menghitung rasio guru dan murid menurut jenjang pendidikan:

Rasio guru dan murid SD/MI =

Rasio guru dan murid SMP/MTs =

Rasio Guru dan Murid pendidikan dasar =

* + - * 1. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
      1. Pendidikan Menengah
         1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Sajikan data APS usia pendidikan menengah untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, seperti pada penjelasan 2.1.1.1.1 APS untuk pendidikan dasar.

Kemudian hitung APS jenjang pendidikan menengah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

APS 16-19

* + - * 1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Sajikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap pendidikan menengah untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, seperti pada penjelasan 3.1.1.2.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah.

Kemudian hitung rasio ketersediaan sekolah menurut jenjang pendidikan menengah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Ketersediaan sekolah SMA/MA/SMK =

* + - * 1. Rasio guru terhadap murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Sajikan rasio guru terhadap murid pendidikan menengah untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota. Kemudian hitung rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

=

* + - * 1. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

* + 1. Kesehatan
       1. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Posyandu dan Balita

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah posyandu |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah balita |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Posyandu dan Balita

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah posyandu | Jumlah balita | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2 | Dst ..... |  |  |  |
| 3 | Kota .... |  |  |  |
| 4 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Posyandu dan Balita

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah posyandu |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah balita |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Posyandu dan Balita

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah posyandu | Jumlah balita | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah Penduduk | Puskesmas | | Poliklinik | | Pustu | |
| Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7=6/3) | (8) | (9=8/3) |
| 1 | Kabupaten .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Puskesmas |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Poliklinik |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Pustu |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 5. | Rasio Puskesmas persatuan penduduk |  |  |  |  |  |
| 6. | Rasio Poliklinik persatuan penduduk |  |  |  |  |  |
| 7. | Rasio Pustu persatuan penduduk |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Puskesmas | | Poliklinik | | Pustu | |
| Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7=6/3) | (8) | (9=8/3) |
| 1 | Kecamatan...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Untuk menghitung rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah Rumah Sakit Daerah |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah seluruh Rumah Sakit |  |  |  |  |  |
| 6. | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 7. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Rumah Sakit

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah Penduduk | Rumah Sakit Umum (Pemerintah) | | Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah | | Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI | | Rumah Sakit Daerah | | Rumah Sakit Swasta | | Total | |
| Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah Rumah Sakit Daerah |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah seluruh Rumah Sakit |  |  |  |  |  |
| 6. | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 7. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Rumah Sakit

menurut Kecamatan tahun ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Rumah Sakit Umum (Pemerintah) | | RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah | | Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI | | Rumah Sakit Daerah | | Rumah Sakit Swasta | | Total | |
| Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio | Jmlh | Rasio |
| 1 | Kecamatan...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

* + - 1. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Dokter Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah Dokter |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 3 | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Tahun .....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Jumlah Dokter | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2 | Dst ..... |  |  |  |
| 3 | Kota .... |  |  |  |
| 4 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Dokter Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah Dokter |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 3 | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun .....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Dokter | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Untuk menghitung rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Tenaga Medis Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah Tenaga Medis |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 3 | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota Tahun .....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Jumlah  Tenaga Medis | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Tenaga Medis Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah Tenaga Medis |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 3 | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun .....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Tenaga Medis | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + 1. Lingkungan Hidup
       1. Persentase penanganan sampah

Untuk menghitung persentase penanganan sampah dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah sampah yang ditangani |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah volume produksi sampah |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/Kota | Jumlah sampah  yang ditangani | Jumlah volume produksi sampah | Persentase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk Kabupaten:

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah sampah yang ditangani |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah volume produksi sampah |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah sampah yang ditangani | Jumlah volume produksi sampah | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Persentase penduduk berakses air minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung [logam berat](http://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berat). Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh [bakteri](http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri) (misalnya [*Escherichia coli*](http://id.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli)) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses

Air Minum dan Jumlah Penduduk

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase penduduk berakses air bersih |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses

Air Minum dan Jumlah Penduduk

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah penduduk | Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan

Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase penduduk berakses air bersih |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum

dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk  yang mendapatkan akses air minum | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2 | Kecamatan ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

* + - 1. Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan .

Untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | luas area permukiman tertata |  |  |  |  |  |
| 2. | luas area permukiman keseluruhan |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase Luas Permukiman yang Tertata |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Luas Area Permukiman Keseluruhan | Luas Area Permukiman Tertata | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | luas area permukiman tertata |  |  |  |  |  |
| 2. | luas area permukiman keseluruhan |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase Luas Permukiman yang Tertata |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Luas Area Permukiman Keseluruhan | Luas Area Permukiman Tertata | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |
| 3 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

* + 1. Sarana dan Prasarana Umum
       1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu :

* + - * 1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis *(“engineering criteria”)* yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.
2. Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.
3. Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.
   * + - 1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
2. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas.
3. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
4. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
5. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda – 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.
   * + - 1. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan

Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya.

Kondisi diukur (terutama) dengan besaran nilai Kondisi, sedangkan aspek pemanfaatan diukur dengan besaran V/C ratio. V/C ratio menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani arus (pergerakan) lalu – lintas, dimana semakin besar nilai V/C ratio berarti semakin rendahnya tingkat pelayanan jalan tersebut yang ditunjukkan dengan terjadinya kemacetan. Batasan nilai V/C ratio yang menunjukkan tingkat pelayanan mulai mendekati kemacetan diambil > 0,65.

Untuk menghitung proporsi panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat disusun tabel sebagai berikut :

Untuk Provinsi:

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kondisi Jalan | Panjang Jalan (km) | | | | |
| (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kondisi Baik |  |  |  |  |  |
| 2. | Kondisi Sedang Rusak |  |  |  |  |  |
| 3. | Kondisi Rusak |  |  |  |  |  |
| 4. | Kondisi Rusak Berat |  |  |  |  |  |
| 5. | Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Kondisi Baik | Kondisi Sedang Rusak | Kondisi Rusak | Kondisi Rusak Berat | Jalan secara keseluruhan |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Kondisi Jalan | Panjang Jalan (km) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kondisi Baik |  |  |  |  |  |
| 2. | Kondisi Sedang Rusak |  |  |  |  |  |
| 3. | Kondisi Rusak |  |  |  |  |  |
| 4. | Kondisi Rusak Berat |  |  |  |  |  |
| 5. | Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Menurut Kecamatan tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Kondisi Baik | Kondisi  Sedang Rusak | Kondisi  Rusak | Kondisi  Rusak Berat | Jalan secara keseluruhan |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

* + - 1. Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Untuk menghitung Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat disusun tabel sebagai berikut :

Untuk Provinsi:

Rasio Jaringan Irigasi

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan | | | | |
| (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jaringan primer |  |  |  |  |  |
| 2. | Jaringan Sekunder |  |  |  |  |  |
| 3. | Jaringan Tersier |  |  |  |  |  |
| 4. | Luas lahan budidaya |  |  |  |  |  |
| 5. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Jaringan Irigasi

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten  /Kota | Panjang Jaringan Irigasi | | | Total Panjang Jaringan Irigasi | Luas lahan budidaya | Rasio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer | Sekunder | Tersier |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=3+4+5) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Jaringan Irigasi

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan | | | | |
| (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jaringan primer |  |  |  |  |  |
| 2. | Jaringan Sekunder |  |  |  |  |  |
| 3. | Jaringan Tersier |  |  |  |  |  |
| 4. | Luas lahan budidaya |  |  |  |  |  |
| 5. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Jaringan Irigasi

menurut Kecamatan tahun ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Panjang Jaringan Irigasi | | | Total Panjang Jaringan Irigasi | Luas lahan budidaya | Rasio |
| Primer | Sekunder | Tersier |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=3+4+5) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

* 1. Tingkat efisiensi akan diukur dari nilai Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR) dengan rumusan sebagai berikut:

Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien.

Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR. PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi, dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar. Sementara itu PIR atau disebut juga *Relative Irrigation Supply (RIS)* menunjukkan nisbah antara pasok irigasi total dengan kebutuhan air tanaman, dan PAR atau *Relative Water Supply* (RWS) merupakan nisbah total pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan air tanaman.

PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Selisih antara PAR dan PIR merupakan curah hujan yang dapat digunakan tanaman. Apabila curah hujan tinggi dan nilai PIR juga tinggi maka fenomena ini menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan. Semakin kecil nilai PIR dan PAR menunjukkan bahwa efisiensi manajemen irigasi semakin bagus.

* 1. Tingkat efektivitas akan diukur dari nilai Indek Luas Areal (IA), dengan rumusan berikut:

Luas rancangan = rancangan luas areal

Semakin tinggi nilai IA menunjukkan semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi.

Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nisbah antara luas areal terairi terhadap luas rancangan. Dalam hal ini semakin tinggi nisbah tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Dengan pemahaman seperti itu, di lapangan diidentifikasi rasio atau nisbah luas areal terairi terhadap rancangan luas areal mencapai 91% (0,91). Artinya dari seluruh target areal yang akan diairi hanya ada sekitar 9% saja yang tidak terairi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (89%), efektifitas pengelolaan air ini mengalami peningkatan sekitar 2%.

Hasil Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi

Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Pasokan Irigasi | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Pasok Irigasi per Area |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasok Irigasi Relatif |  |  |  |  |  |
| 3. | Pasok Air Relatif |  |  |  |  |  |
| 4. | Indek Luas Areal |  |  |  |  |  |
| 5. | Rancangan Luas Areal |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Luas Rancangan  (Ha) | Luas Lahan Terairi  (Ha) | Kebutuhan Air Tanaman  (Ha) | Pasok Air Irigasi  (lt/ dtk) | Pasok Air Irigasi Total  (lt/ dtk) | Total Pasok Air  (lt/ dtk) | PIA  (lt/ dtk/ha) | PIR  (lt/ dtk/ha) | PAR  (lt/ dtk/ha) | IA  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6/4 | 10=7/5 | 11=8/5 | 12=4/3 |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Pasokan Irigasi | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Pasok Irigasi per Area |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasok Irigasi Relatif |  |  |  |  |  |
| 3. | Pasok Air Relatif |  |  |  |  |  |
| 4. | Indek Luas Areal |  |  |  |  |  |
| 5. | Rancangan Luas Areal |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi

Menurut Kecamatan Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Luas Rancangan  (Ha) | Luas Lahan Terairi  (Ha) | Kebutuhan Air Tanaman  (Ha) | Pasok Air Irigasi  (lt/ dtk) | Pasok Air Irigasi Total  (lt/ dtk) | Total Pasok Air  (lt/ dtk) | PIA  (lt/ dtk/ha) | PIR  (lt/ dtk/ha) | PAR  (lt/ dtk/ha) | IA  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6/4 | 10=7/5 | 11=8/5 | 12=4/3 |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Untuk Provinsi:

Rasio Tempat Ibadah

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Bangunan tempat Ibadah | Thn (n-5) | | | Thn (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/8) |
| 1. | Mesjid |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gereja |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pura |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vihara |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kelenteng |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lain-Lain |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Tempat Ibadah

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Mesjid | | | Gereja | | | Pura | | | Vihara | | | Kelenteng | | | Lain-lain | | |
| Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Tempat Ibadah

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Bangunan tempat Ibadah | Thn (n-5) | | | Thn (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/8) |
| 1. | Mesjid |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gereja |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pura |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vihara |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kelenteng |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lain-Lain |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Tempat Ibadah

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Mesjid | | | Gereja | | | Pura | | | Vihara | | | Kelenteng | | | Lain-lain | | |
| Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio | Jumlah  (unit) | Jumlah pemeluk | Rasio |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

* 1. Fasilitas Air bersih
  2. Pembuangan Tinja
  3. Pembuangan air limbah (air bekas)
  4. Pembuangan sampah

Hasil analisis data rumah tinggal berakses sanitasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah rumah tinggal |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tinggal | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah rumah tinggal |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah rumah tinggal | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan.

Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Untuk menghitung rasio tempat pemakaman disajikan tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun (n-5) | | | Tahun (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah | Luas | Daya Tampung | Jumlah | Luas | Daya Tampung |
| 1. | Tempat pemakaman umum (TPU) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tempat pemakaman khusus (TPK) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lain-Lain |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah Tempat Pemakaman |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jumlah penduduk (jiwa) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rasio TPU persatuan penduduk (1/6) |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Tempat Pemakaman Umum (TPU) | | Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) | | Tempat Pemakaman Khusus (TPK) | | Lain-Lain | | Jumlah Total | | Rasio TPU Persatuan Penduduk |
| Jmlh | Daya tampung | Jmlh | Daya Tampung | Jmlh | Daya Tampung | Jmlh | Daya Tampung | Tmpt Pemakaman | Daya Tampung |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12=4+6+8+10) | (13=5+7+9+11) | (14=4/3) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun (n-5) | | | Tahun (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah | Luas | Daya Tampung | Jumlah | Luas | Daya Tampung |
| 1. | Tempat pemakaman umum (TPU) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tempat pemakaman khusus (TPK) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lain-Lain |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah Tempat Pemakaman |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jumlah penduduk (jiwa) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rasio TPU persatuan penduduk (1/6) |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Tempat pemakaman umum (TPU) | | Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU) | | Tempat pemakaman khusus (TPK) | | Lain-Lain | | Jumlah Total | | Rasio TPU persatuan penduduk |
| Jmlh | Daya tampung | Jmlh | Daya tampung | Jmlh | Daya tampung | Jmlh | Daya tampung | Tmpt Pemakaman | Daya tampung |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12=4+6+8+10) | (13=5+7+9+11) | (14=4/3) |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Untuk Provinsi:

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah TPS |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 4. | Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah Penduduk  (jiwa) | TPS | | Rasio |
| Jumlah  (unit) | Jumlah Daya Tampung  (Ton) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/3) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah TPS |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 4. | Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk  (jiwa) | TPS | | Rasio |
| Jumlah  (unit) | Jumlah Daya Tampung  (Ton) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/3) |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

* + - 1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

* + - 1. Rasio permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

* + 1. Penataan Ruang
       1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan dengan kriteria:

* 1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
  2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
  3. didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Untuk Provinsi:

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas wilayah ber HPL/HGB |  |  |  |  |  |
| 3. | Luas wilayah |  |  |  |  |  |
| 4. | Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten | Luas Wilayah | Luas Wilayah ber HPL/HGB | Luas Ruang Terbuka Hijau | Rasio Ruang Terbuka Hijau |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas wilayah ber HPL/HGB |  |  |  |  |  |
| 3. | Luas wilayah |  |  |  |  |  |
| 4. | Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Luas Wilayah | Luas wilayah ber HPL/HGB | Luas Ruang Terbuka Hijau | Rasio Ruang Terbuka Hijau |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4) |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Untuk Provinsi:

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Bangunan ber-IMB |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Bangunan |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio bangunan ber-IMB (1:2) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten | Jumlah Bangunan | Jumlah Bangunan ber-IMB | Rasio bangunan ber-IMB |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Bangunan ber-IMB |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Bangunan |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio bangunan ber-IMB (1:2) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Bangunan | Jumlah Bangunan ber-IMB | Rasio bangunan ber-IMB |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

* + 1. Perhubungan
       1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Untuk Provinsi:

Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah penumpang Bis |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah penumpang Kereta api |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah penumpang Kapal laut |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah penumpang Pesawat udara |  |  |  |  |  |
| 5. | Total Jumlah Penumpang |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/kota | Jumlah penumpang | | | | Total Jumlah Penumpang |
| Bis | Kereta api | Kapal laut | Pesawat udara |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=3+4+5+6) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah penumpang Bis |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah penumpang Kereta api |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah penumpang Kapal laut |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah penumpang Pesawat udara |  |  |  |  |  |
| 5. | Total Jumlah Penumpang |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah penumpang | | | | Total Jumlah Penumpang |
| Bis | Kereta Api | Kapal Laut | Pesawat Udara |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=3+4+5+6) |
| 1. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan .... |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Jaringan trayek terdiri atas:

1. jaringan trayek lintas batas negara;
2. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
3. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
4. jaringan trayek perkotaan; dan
5. jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Untuk Provinsi:

Rasio Ijin Trayek

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Izin Trayek antarkota antarprovinsi |  |  |  |  |  |
| 2. | Izin Trayek perkotaan |  |  |  |  |  |
| 3. | Izin Trayek perdesaan |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah Izin Trayek |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 6. | Rasio Izin Trayek |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Ijin Trayek

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/kota | Jumlah penduduk | Jumlah Izin Trayek | | | Total Jumlah Izin Trayek | Rasio Izin Trayek |
| antarkota antar provinsi | Perkotaan | perdesaan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=4+5+6) | (8=7/3) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Ijin Trayek

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Izin Trayek perkotaan |  |  |  |  |  |
| 2. | Izin Trayek perdesaan |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Izin Trayek |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 5. | Rasio Izin Trayek |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Ijin Trayek

Menurut Kecamatan Tahun....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Izin Trayek | | Total Jumlah Izin Trayek | Rasio Izin Trayek |
| Perkotaan | Perdesaan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7=4+5+6) | (8=7/3) |
| 1. | Kecamatan.... |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan.... |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

1. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
2. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Untuk Provinsi:

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Angkutan Umum | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % |
| 1. | Mobil penumpang umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mobil bus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mobil barang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kereta gandengan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kereta tempelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun.

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Angkutan Umum | Mobil penumpang umum | | | Mobil bus | | | Mobil barang | | | Kereta gandengan | | | Kereta tempelan | | | Jmlh Angkutan | Jmlh  KIR | % |
| Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/6) | (9) | (10) | (11=10/9) | (12) | (13) | (14=13/12) | (15) | (16) | (17=16/15) | (18) | (19) | (20=19/18) |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Angkutan Umum | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % |
| 1. | Mobil penumpang umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mobil bus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mobil barang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kereta gandengan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kereta tempelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun

Menurut Kecamatan Tahun ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Angkutan Umum | Mobil penumpang umum | | | Mobil bus | | | Mobil barang | | | Kereta gandengan | | | Kereta tempelan | | | Jmlh Angkutan | Jmlh  KIR | % |
| Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % | Jmlh | Jmlh KIR | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/6) | (9) | (10) | (11=10/9) | (12) | (13) | (14=13/12) | (15) | (16) | (17=16/15) | (18) | (19) | (20=19/18) |
| 1. | Kecamatan... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - 1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana [transportasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi) [jalan](http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan) untuk keperluan menurunkan dan menaikkan [penumpang](http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang), perpindahan intra dan/atau antar [moda transportasi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moda_transportasi&action=edit&redlink=1) serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan [kendaraan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan) umum.

Untuk Provinsi:

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah pelabuhan laut |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah pelabuhan udara |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah terminal bis |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/kota | Jumlah | | |
| Pelabuhan laut | pelabuhan udara | terminal bis |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |
| 2. | Dst ... |  |  |  |
| 3. | Kota .... |  |  |  |
| 4. | Dst ... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah pelabuhan laut |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah pelabuhan udara |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah terminal bis |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* 1. Fokus Layanan Urusan Pilihan
     1. Penanaman Modal
        1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Untuk menghitung jumlah investor PMDN/PMA dapat disusun tabel sebagai berikut:

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Uraian | PMDN | PMA | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3+4) |
| n-5 | Jumlah Investor |  |  |  |
| n-4 | Jumlah Investor |  |  |  |
| n-3 | Jumlah Investor |  |  |  |
| n-2 | Jumlah Investor |  |  |  |
| n-1 | Jumlah Investor |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

* + - 1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Untuk menghitung nilai PMDN/PMA dapat disusun tabel sebagai berikut:

Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Persetujuan | | Realisasi | |
| JumlahProyek | Nilai Investasi | JumlahProyek | Nilai Investasi |
| n-5 |  |  |  |  |
| n-4 |  |  |  |  |
| n-3 |  |  |  |  |
| n-2 |  |  |  |  |
| n-1 |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

* + - 1. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN.

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM.

Menghitung Rasio daya serap tenaga kerja digunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/PMDN |  |  |  |  |  |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

* + 1. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
       1. Persentase koperasi aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Menghitung persentase koperasi aktif digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Koperasi Aktif Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah koperasi aktif |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah koperasi |  |  |  |  |  |
| 3 | Persentase koperasi aktif |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Koperasi Aktif Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi |  |  |  |  |  |
|  | Persentase koperasi aktif |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi |  |  |  |  |  |
|  | Persentase koperasi aktif |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst.. |  |  |  |  |  |
|  | dst. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi aktif |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah koperasi |  |  |  |  |  |
|  | Total Persentase koperasi aktif |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

* + - 1. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Menghitung jumlah UKM non BPR/LKM UKM dilakukan dengan mengisi tabel berikut.

Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah seluruh UKM |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah BPR/LKM |  |  |  |  |  |
| 3 | Jumlah UKM non BPR/LKM |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah seluruh UKM |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah BPR/LKM |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah UKM non BPR/LKM |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah seluruh UKM |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah BPR/LKM |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah UKM non BPR/LKM |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst.. |  |  |  |  |  |
|  | dst. |  |  |  |  |  |
|  | Total Provinsi |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah seluruh UKM |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah BPR/LKM |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah UKM non BPR/LKM |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

* + - 1. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan *(deposits)*, kredit *(loan)*, pembayaran sebagai transaksi jasa *(payment service)* serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Menghitung Jumlah BPR/LKM dilakukan dengan mengisi tabel berikut.

Jumlah BPR/LKM Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah BPR |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah LKM |  |  |  |  |  |
| 3 | Jumlah BPR dan LKM |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Jumlah UKM BPR/LKM tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |
| 2 | Kota.. |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst.. |  |  |  |  |  |
|  | dst. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin banyak jumlah BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM.

* + 1. Kependudukan

1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

1. Faktor penambah
2. Kelahiran *(fertilitas)* adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
3. Migrasi masuk *(imigrasi)* adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan
4. Faktor pengurang
5. Kematian *(mortalitas)* adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup*.*
6. Migrasi keluar *(emigrasi)* adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Rasio perpindahan peduduk pertahun dapat dihitung dengan rumus:

Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi) dan keluar (emigrasi) dihitung dengan rumus:

Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu.

Rumus menghitung pertumbuhan penduduk :

Angka pertumbuhan penduduk (r) adalah: rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun pada periode\waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dengan persen.

Ada 3 macam ukuran pertumbuhan penduduk:

* 1. Pertumbuhan (linier).

Perhitungan ini mengasumsikan adanya perubahan jumlah absolut penduduk yang sama dari satu tahun ketahun yang lain.

Dirumuskan:

keterangan:

r = angka perubahan linier

Pt = jumlah penduduk pada akhir periode

Po = jumlah penduduk pada awal periode

N = jumlah tahun dalam periode tersebut

P = jumlah penduduk pada pertengahan periode

* 1. Pertumbuhan Geometri.

Pertumbuhan ini mengasumsikan adanya angka pertumbuhan jumlah penduduk yang sama dari tahun ke tahun

Rumus :

Pt = Po (1+r)

Keterangan:

Pt = jumlah penduduk pada akhir periode

Po = jumlah penduduk pada awal periode

n = jumlah tahun dalam periode tersebut

r = angka pertumbuhan geometris

* 1. Pertumbuhan eksponensial perhitungan ini sama dengan pertumbuhan Geometri tetapi pertambahan penduduk terjadi setiap saat mengikuti fungsi eksponensial.

Rumus:

atau

Keterangan:

Pt = jumlah penduduk pada akhir periode

Po = jumlah penduduk pada awal periode

n = jumlah tahun dalam periode tersebut

e = angka pertumbuhan eksponensial

Perhitungan laju pertumbuhan penduduk didasarkan pada perhitungan:

1. Angka Kelahiran Kasar *(crude birth rate)* yaitu jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam suatu tahun tertentu

Rumus:

Keterangan:

CBR = angka kelahiran kasar

B = jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu

D = jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama

k = konstanta biasanya 1000

1. Angka Kematian Kasar *(Crude Death Rate)* yaitu jumlah kematian pada tahun tertentu per 1000 penduduk:

Rumus:

Keterangan:

CDR = angka kematian kasar

D = jumlah kematian pada tahun tertentu

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun itu

1. Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate*  (IMR) adalah jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan.

Rumus:

Keterangan:

IMR = angka kematian bayi

Do = jumlah kematian bayi selama 1 tahun

B = jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama

Hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk dituangkan dalam tabel berikut.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Provinsi/Kabupaten/Kota……. Tahun . . .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Fertilitas/mortalitas | Jumlah |
| 1 | Angka kelahiran kasar (CBR) |  |
| 2 | Angka kematian kasar (CDR) |  |
| 3 | Angka kematian bayi (IMR) |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Pengelompokan Penduduk
   * + - 1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan umur

Rasio jenis kelamin (*sex rasio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan ( (penduduk laki-laki) : (penduduk perempuan) x 100. Dari rumusan tersebut dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut:

Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Provinsi.......\*) Tahun…..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Kabupaten…. |  |  |  |
| 2 | Kabupaten…. |  |  |  |
| 3 | Dst…. |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur

Kabupaten/Kota….. Tahun.....

Provinsi……

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelompok Umur | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 0-4 |  |  |  |  |  |
| 5-9 |  |  |  |  |  |
| 10-14 |  |  |  |  |  |
| 15-19 |  |  |  |  |  |
| 20-24 |  |  |  |  |  |
| 25-29 |  |  |  |  |  |
| 30-34 |  |  |  |  |  |
| 35-39 |  |  |  |  |  |
| 40-44 |  |  |  |  |  |
| 45-49 |  |  |  |  |  |
| 50-54 |  |  |  |  |  |
| 55-59 |  |  |  |  |  |
| 60-64 |  |  |  |  |  |
| 65-69 |  |  |  |  |  |
| 70-74 |  |  |  |  |  |
| 75+ |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur

Kabupaten/Kota…. Tahun....

Provinsi……

| Kelompok Umur | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 |  |  |  |  |  |
| 5-9 |  |  |  |  |  |
| 10-14 |  |  |  |  |  |
| 15-19 |  |  |  |  |  |
| 20-24 |  |  |  |  |  |
| 25-29 |  |  |  |  |  |
| 30-34 |  |  |  |  |  |
| 35-39 |  |  |  |  |  |
| 40-44 |  |  |  |  |  |
| 45-49 |  |  |  |  |  |
| 50-54 |  |  |  |  |  |
| 55-59 |  |  |  |  |  |
| 60-64 |  |  |  |  |  |
| 65-69 |  |  |  |  |  |
| 70-74 |  |  |  |  |  |
| 75+ |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

Tahun...... Kabupaten/Kota…….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Rasio Jenis kelamin |
| 1. Kecamatan…. |  |  |  |  |
| 1. Kecamatan… |  |  |  |  |
| 1. dst |  |  |  |  |
| Jumlah Total |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - * 1. Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis

Persebaran penduduk dapat dihitung berdasarkan:

1. persebaran geografis; yaitu persebaran penduduk menurut pulau.
2. persebaran administrative dan politis, yaitu persebaran penduduk berdasarkan provinsi, kabupaten, daerah istimewa.

Tabel berikut dapat digunakan untuk menghitung persebaran penduduk provinsi tertentu.

Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan

Tahun.... Provinsi.......\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Luas wilayah  (km2) | Kepadatan  (%) |
| 1 | Kabupaten/Kota …. |  |  |  |
| 2 | Kabupaten/Kota …. |  |  |  |
| 3 | Dst… |  |  |  |
| Jumlah se-Provinsi | |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + - * 1. Pengelompokan Penduduk Berdasar tingkat pendidikan

Selain berdasarkan jenis kelamin, penduduk juga dapat dikelompokan berdasarkan tingkat pendidikan. Pengelompokan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat menggunakan tabel berikut.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun..... Provinsi.......\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Pendidikan | | | | | Jumlah |
| SD/MI | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | Tidak Sekolah |
| 1 | Kabupaten/Kota…. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten/kota .. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst… |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah | |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Selanjutnya dari data yang ada, untuk mengetahui prosentasenya, dispesifikasikan lagi berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun .....

Kabupaten…. Kecamatan…..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan yang Ditamatkan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase  (%) |
| 1 | Tidak punya ijazah SD |  |  |  |  |
| 2 | SD/MI sederajat |  |  |  |  |
| 3 | SMP |  |  |  |  |
| 4 | SMA |  |  |  |  |
| 5 | Perguruan tinggi |  |  |  |  |
| Jumlah | |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah.

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Hasil perhitungan rasio diatas, kemudian dituangkan dalam tabel berikut.

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah

Tahun ...... Provinsi.......\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan | | | | | | | |
| KTP | | KK | | Akte lahir | | Akte nikah | |
| Sdh | blm | Sdh | blm | Sdh | blm | Sdh | blm |
| 1 | Kabupaten …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dst… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah se-provinsi | |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Guna mengetahui jumlah penduduk peserta KB pada suatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumusan berikut:

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Hasil perhitungan dituangkan dalam tabel berikut.

Jumlah Penduduk Peserta KB

Provinsi.......\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Peserta KB | | |
| PUS | Peserta KB | Tidak KB |
| 1 | Kabupaten …. |  |  |  |
| 2 | Kabupaten…. |  |  |  |
| 3 | Dst… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Jumlah se-Provinsi | |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + 1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja *(man power)* adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

1. Angkatan Kerja *(labor force)*

Berdasarkan publikasi ILO *(International Labour Organization)*, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

Tingkat partisipasi umum yaitu jumlah angkatan kerja dibagi seluruh penduduk berumur 10 tahun keatas.

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja

dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun......

Provinsi/Kabupaten/Kota…..\*)

| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANGKATAN KERJA |  |  |  |
|  | 1. Bekerja |  |  |  |
|  | 1. Pengangguran |  |  |  |
|  | Jumlah penduduk angkatan kerja (i) |  |  |  |
| 2 | BUKAN ANGKATAN KERJA |  |  |  |
|  | 1. Sekolah |  |  |  |
|  | 1. Mengurus RT |  |  |  |
|  | 1. Lainnya |  |  |  |
|  | Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii) |  |  |  |
|  | Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii) |  |  |  |
| 3 | TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) |  |  |  |
| 4 | TPT (tingkat pengangguran terbuka) |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran)

Penduduk Angkatan Kerja kabupaten/kota…..

Provinsi.......\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Golongan Umur | Angkatan Kerja | | Jumlah |
| Bekerja | Mencari Pekerjaan |
| (1) | (2) | (3) | (4=2+3) |
| 15-19 |  |  |  |
| 20-24 |  |  |  |
| 25-29 |  |  |  |
| 30-34 |  |  |  |
| 35-39 |  |  |  |
| 40-44 |  |  |  |
| 45-49 |  |  |  |
| 50-54 |  |  |  |
| 55-59 |  |  |  |
| 60-64 |  |  |  |
| 65+ |  |  |  |
| Total |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Produktivitas Kerja

Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

1. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Data ini bisa didapat dari BPS sebagaimana dalam tabel berikut.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun.....

Provinsi.......\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten  /Kota | Lapangan Usaha | | | | | | | | Jml |
| Pertanian | Industri pengolahan | Bangunan | Perdaganga, Restoran dan Hotel | Angkutan, Pergudangan, Komunikasi | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan | Jasa Kemasyarakatan | Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum) |
| 1 | Kab/Kota.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kab/Kota... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total se provinsi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Melihat jumlah lapangan kerja yang tersedia, sering kali dijumpai adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja. Tingkat sengketa antara pengusaha dan pekerja per tahun dihitung dengan rumusan:

1. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Lima bentuk pengangguran:

1. Pengangguran terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan)
2. Setengah menganggur *(underemployment)*: yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka kerjakan.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh; yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, termasuk disini adalah:
4. Pengangguran tidak kentara *(disguised unemployment)*, misalnya para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.
5. Pengangguran tersembunyi *(hidden unemployment)*, misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
6. Pensiun lebih awal
7. Tenaga kerja yang lemah *(impaired)*; yaitu mereka yang mampu untuk bekerja full time tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
8. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena semberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai sehingga mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

* + 1. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV.

Sajikan data persentase perempuan di lembaga pemerintah , dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III |  |  |  |  |  |
| 3 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV |  |  |  |  |  |
| 4 | Pekerja perempuan di pemerintah |  |  |  |  |  |
| 5 | Jumlah pekerja perempuan |  |  |  |  |  |
| 6 | Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun .... Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah | Jumlah pekerja perempuan | Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Sajikan data persentase perempuan di lembaga swasta , dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah pekerja perempuan |  |  |  |  |  |
| 3 | Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun .... Menurut

Kabupaten/Kota/Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta | Jumlah pekerja perempuan | Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

1. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Sajikan data rasio KDRT, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rasio KDRT

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah KDRT |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga |  |  |  |  |  |
| 3 | Rasio KDRT |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio KDRT Tahun .... Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah KDRT | Jumlah rumah tangga | Rasio KDRT |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

Sajikan data persentase tenaga kerja di bawah umur, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Pekerja anak usia 5-14 tahun |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas |  |  |  |  |  |
| 3 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur.... Menurut Kabupaten/Kota Tahun....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/kota | Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun | Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas | Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + 1. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.

Sajikan data rata-rata jumlah anak perkeluarga, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah anak |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah keluarga |  |  |  |  |  |
| 3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kabupaten/Kota Tahun....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Jumlah Anak | Jumlah Keluarga | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 2 | Dst ..... |  |  |  |
| 3 | Kota .... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

1. Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Besarnya angka partisipasi KB *(akseptor)* menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Sajikan data rasio akseptor KB, dirinci menurut kabupaten/kota untuk provinsi dan dirinci menurut kecamatan untuk daerah kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rasio Akseptor KB Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Jumlah akseptor KB |  |  |  |  |  |
| 2 | Jumlah pasangan usia subur |  |  |  |  |  |
| 3 | Rasio akseptor KB |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio Akseptor KB Menurut Kabupaten/Kota Tahun.....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Jumlah akseptor KB | Jumlah pasangan usia subur | Rasio akseptor KB |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

* + 1. Komunikasi Dan Informasi

1. Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

Untuk menghitung jaringan komunikasi dapat disusun tabel sebagai berikut:

Jaringan Komunikasi Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Tahun n-5 | Tahun n-1 |
| 1 | Jumlah jaringan telepon genggam |  |  |
| 2 | Jumlah jaringan telepon stasioner |  |  |
| 3 | Total jaringan Komunikasi (1+2) |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

1. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk.

Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Menghitung ketersediaan wartel/warnet per 1.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

| NO | Kabupaten/kota | Tahun n-5 | | | | | Tahun n-1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmlh Pddk | Jumlah  wartel | Jumlah  warnet | Rasio  wartel | Rasio  warnet | Jmlh Pddk | Jumlah  wartel | Jumlah  warnet | Rasio  wartel | Rasio  Warnet |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=4/3) | (7=5/3) | (8) | (9) | (10) | (11=9/8) | (12=10/8) |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | Tahun n-5 | | | | | Tahun n-1 | | | | |
| Jmlh Pddk | Jumlah  wartel | Jumlah  warnet | Rasio  wartel | Rasio  warnet | Jmlh Pddk | Jumlah  wartel | Jumlah  warnet | Rasio  wartel | Rasio  Warnet |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=4/3) | (7=5/3) | (8) | (9) | (10) | (11=9/8) | (12=10/8) |
| 1. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Semakin besar rasio wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

1. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah.

Untuk menghitung surat kabar terbitan nasional atau lokal dapat disusun tabel sebagai berikut:

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Tahun n-5 | Tahun n-1 |
| 1 | Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional |  |  |
| 2 | Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal |  |  |
| 3 | Total jenis surat kabar (1+2) |  |  |

Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

1. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.

Untuk menghitung jumlah penyiaran radio/TV lokal dapat disusun tabel sebagai berikut:

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun .... s.d ....

Provinsi /Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Tahun n-5 | Tahun n-1 |
| 1 | Jumlah penyiaran radio lokal |  |  |
| 2 | Jumlah penyiaran radio nasional |  |  |
| 3 | Jumlah penyiaran TV lokal |  |  |
| 4 | Jumlah penyiaran TV nasional |  |  |
| 5 | Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4) |  |  |

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

* + 1. Pertanahan

1. Persentase luas lahan bersertifikat

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan.

Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak- hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

Menghitung prosentase luas lahan bersertifikat digunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Luas Lahan (m2) Berdasar Sertifikat Tahun .... s.d ....

Provinsi....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | | | | (n-4) | | | | (n-3) | | | | (n-2) | | | | (n-1)\*\*) | | | |
| HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kota.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Total luas wilayah |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Prosentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun .... s.d ....

Provinsi....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | | | | (n-4) | | | | (n-3) | | | | (n-2) | | | | (n-1)\*\*) | | | |
| HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL | HGB | HGU | HM | HPL |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kota.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Total luas wilayah |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Luas Lahan Bersertifikat Tahun .... S.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas wilayah daratan |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas tanah bersertifikat HGB |  |  |  |  |  |
| 3. | Luas tanah bersertifikat HGU |  |  |  |  |  |
| 4. | Luas tanah bersertifikat HM |  |  |  |  |  |
| 5. | Luas tanah bersertifikat HPL |  |  |  |  |  |
| 6. | Total luas tanah bersertifikat |  |  |  |  |  |
| 7. | Prosentase HGB dibanding luas daratan |  |  |  |  |  |
| 8. | Prosentase HGU dibanding luas daratan |  |  |  |  |  |
| 9. | Prosentase HM dibanding luas daratan |  |  |  |  |  |
| 10. | Prosentase HGPL dibanding luas daratan |  |  |  |  |  |
| 11. | Prosentase total luas lahan bersertifikat |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

* + 1. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM.

Menghitung rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) digunakan rumus sebagai berikut:

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Kelompok Binaan LPM Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/  Kota | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/6) | (9) | (10) | (11=10/9) | (12) | (13) | (14=13/12) | (15) | (16) | (17=16/15) |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah se-Provinsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Kelompok Binaan LPM Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM | Jumlah  LPM | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  LPM |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/6) | (9) | (10) | (11=10/9) | (12) | (13) | (14=13/12) | (15) | (16) | (17=16/15) |
| 1. | Kecamatan ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah se-Kab/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK.

Menghitung rata-rata jumlah kelompok binaan PKK digunakan rumus sebagai berikut:

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Untuk menghitung Jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK.

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Kelompok Binaan PKK Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | J Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/6) | (9) | (10) | (11=10/9) | (12) | (13) | (14=13/12) | (15) | (16) | (17=16/15) |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah se-Provinsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Kelompok Binaan PKK Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | J Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK | Jumlah  PKK | Jumlah  Kelompok  Binaan | Rata-rata  Jumlah  PKK |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/6) | (9) | (10) | (11=10/9) | (12) | (13) | (14=13/12) | (15) | (16) | (17=16/15) |
| 1. | Kecamatan ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah se-Kab/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

1. Jumlah LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun.

Untuk menghitung LSM yang aktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah LSM Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Aktif | Tidak  Aktif | Terdaftar | Aktif | Tidak  Aktif | Terdaftar | Aktif | Tidak  Aktif | Terdaftar | Aktif | Tidak  Aktif | Terdaftar | Aktif | Tidak  Aktif | Terdaftar |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3+4) | (6) | (7) | (8=6+7) | (9) | (10) | (11=9+10) | (12) | (13) | (14=12+13) | (15) | (16) | (17=15+16) |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah se-Provinsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah LSM aktif Tahun .... s.d ....

Provinsi /Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah LSM terdaftar |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah LSM tidak aktif |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah LSM aktif (1-2) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

* + 1. Perpustakaan

1. Jumlah perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Untuk menghitung jumlah perpustakaan dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Perpustakaan Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Tahun (n-5) | | | Tahun (n-1)\*\*) | | |
| Milik  pemda | Non  pemda | Total | Milik  pemda | Non  pemda | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3+4) | (6) | (7) | (8=6+7) |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah se-Provinsi |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Perpustakaan Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Perpustakaan milik non pemda |  |  |  |  |  |
| 3. | Total Perpustakaan (1+2) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Untuk menghitung jumlah pengunjung perpustakaan dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Tahun (n-5) | | | Tahun (n-1)\*\*) | | |
| Milik  pemda | Non  pemda | Total | Milik  pemda | Non  pemda | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3+4) | (6) | (7) | (8=6+7) |
| 1. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst ... |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jumlah se-Provinsi |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda |  |  |  |  |  |
| 3. | Total pengunjung Perpustakaan (1+2) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

* + 1. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk [dinas daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah) atau [lembaga teknis daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah).

Menghitung rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/  Kota | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmlh  PolPP | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  PolPP | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  PolPP | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  PolPP | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  PolPP | Jmlh  Pddk | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) | (9) | (10) | (11=9/10) | (12) | (13) | (14=12/13) | (15) | (16) | (17=15/16) |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Se-Provinsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah polisi pamong praja |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah .

1. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Menghitung rasio linmas per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/  Kota | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmlh  Linmas | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  Linmas | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  Linmas | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  Linmas | Jmlh  Pddk | Rasio | Jmlh  Linmas | Jmlh  Pddk | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) | (9) | (10) | (11=9/10) | (12) | (13) | (14=12/13) | (15) | (16) | (17=15/16) |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Se-Provinsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Linnmas |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif .

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat .

1. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.

Menghitung rasio pos siskamling per jumlah desa/keluarahan digunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya hasilnya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/Kota | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) | (9) | (10) | (11=9/10) | (12) | (13) | (14=12/13) | (15) | (16) | (17=15/16) |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | (n-5) | | | (n-4) | | | (n-3) | | | (n-2) | | | (n-1)\*\*) | | |
| Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio | Jmlh  siskamling | Jmlh  Desa | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) | (9) | (10) | (11=9/10) | (12) | (13) | (14=12/13) | (15) | (16) | (17=15/16) |
| 1. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

* + 1. Pemuda dan olah raga
       1. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi pemuda dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Organisasi Pemuda

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Dst... |  |  |  |  |  |
| 3. | Kota.. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dst... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Organisasi Pemuda

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |
| 4. | Se-Kabupaten/kota |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

* + - 1. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.

Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi olahraga dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Organisasi Olahraga

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota.. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Organisasi Olahraga

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

* + - 1. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau *“event”* kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.

Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk menghitung jumlah kegiatan kepemudaan dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota.. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

* + - 1. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau *“event”* olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau *“event”* olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk menghitung jumlah kegiatan olahraga dapat disusun tabel sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Jumlah Kegiatan Olahraga

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten.. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota.. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst... |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kecamatan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kecamatan.. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst... |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

* + - 1. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

* 1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

* + 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Untuk Provinsi:

Angka Konsumsi RT per Kapita

Tahun .... s.d .... Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Total Pengeluaran RT |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah RT |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Angka Konsumsi RT per Kapita

Menurut Kabupaten/Kota Tahun .... Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/kota | Total Pengeluaran RT | Jumlah RT | Rasio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2. | Dst ..... |  |  |  |
| 3. | Kota .... |  |  |  |
| 4. | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

Untuk kabupaten/kota:

Angka Konsumsi RT per Kapita

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Total Pengeluaran RT |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah RT |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + 1. Nilai tukar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Untuk Provinsi:

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Indeks yang diterima petani (lt) |  |  |  |  |  |
| 2. | Indeks yang dibayar petani (lb) |  |  |  |  |  |
| 3. | NTP |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

NTP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Indeks yang diterima petani (lt) | Indeks yang dibayar petani (lb) | NTP |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Indeks yang diterima petani (lt) |  |  |  |  |  |
| 2. | Indeks yang dibayar petani (lb) |  |  |  |  |  |
| 3. | NTP |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + 1. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Untuk Provinsi:

Persentase Konsumsi RT non-Pangan Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Total Pengeluaran RT non Pangan |  |  |  |  |  |
| 2. | Total Pengeluaran |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Konsumsi RT non-Pangan Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Total Pengeluaran RT non Pangan | Total Pengeluaran | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2. | Dst ..... |  |  |  |
| 3. | Kota .... |  |  |  |
| 4. | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Persentase Konsumsi RT non-Pangan

Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Total Pengeluaran RT non Pangan |  |  |  |  |  |
| 2. | Total Pengeluaran |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + 1. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Untuk Provinsi:

Produktivitas Per Sektor Tahun......

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sektor | (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1. | PDRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Pertambangan & Penggalian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Industri Pengolahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Listrik,Gas & Air bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Konstruksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Perdagangan, Hotel & Restoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Pengangkutan & Komunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Jasa-jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Angkatan Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

di mana,*i* adalah *sector 1 s.d. 9*

Produktivitas Total Daerah

Provinsi.....\*)

| NO | Uraian | Rasio Produktivitas Daerah | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Untuk kabupaten/kota:

Produktivitas Per Sektor

Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sektor | (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1. | PDRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pertanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Pertambangan & Penggalian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Industri Pengolahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Listrik,Gas & Air bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Konstruksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Perdagangan, Hotel & Restoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Pengangkutan & Komunikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Jasa-jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Angkatan Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* 1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya *(availability)* dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

1. Aksesibilitas daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan:

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Untuk Provinsi:

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Panjang Jalan\*\*\*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Kendaraan |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

\*\*\*) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

| NO | Kabupaten/kota | Panjang Jalan | Jumlah Kendaraan | Rasio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

\*\*\*) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Panjang Jalan |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Kendaraan |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

\*\*\*) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah provinsi

1. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun.

Untuk Provinsi:

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Satuan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah orang | Orang |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Barang | Ton |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

| NO | | Kabupaten/kota | | Jumlah Orang | | Jumlah Barang | | Keterangan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Kabupaten .... | |  | |  | |  | |
| 2. | | Kabupaten ...... | |  | |  | |  | |
| 3. | | Dst ..... | |  | |  | |  | |
| 4. | | Kota .... | |  | |  | |  | |
| 5. | | Dst ...... | |  | |  | |  | |
|  | | Jumlah | |  | |  | |  | |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Satuan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah orang | Orang |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Barang | Ton |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun.

Untuk Provinsi:

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal

Tahun .... s.d ....

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| Orang | Brng | Orang | Brng | Orang | Brng | Orang | Brng | Orang | Brng |
| 1. | Dermaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bandara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Terminal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Dermaga | | Bandara | | Terminal | |
| Orang | Barang | Orang | Barang | Orang | Barang |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| Orang | Brng | Orang | Brng | Orang | Brng | Orang | Brng | Orang | Brng |
| 1. | Dermaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bandara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Terminal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Penataan wilayah
   * + 1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rasio ketaatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW

Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Realisasi RTRW |  |  |  |  |  |
| 2. | Rencana Peruntukan RTRW |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + - 1. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase luas Wilayah Produktif Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah produktif |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Luas Wilayah Produktif

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | Kabupaten/kota | | Luas Wilayah Produktif | | Luas Seluruh Wil. Budidaya | | Rasio | |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5=3/4) | |
| 1 | | Kabupaten .... | |  | |  | |  | |
| 2 | | Kabupaten ...... | |  | |  | |  | |
| 3 | | Dst ..... | |  | |  | |  | |
| 4 | | Kota .... | |  | |  | |  | |
| 5 | | Dst ...... | |  | |  | |  | |
|  | | Jumlah | |  | |  | |  | |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Luas Wilayah Produktif

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah produktif |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + - 1. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Luas Wilayah Industri

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah Industri |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Luas Wilayah Industri

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

| NO | | Kabupaten/kota | | Luas Wilayah Industri | | Luas Seluruh Wil. Budidaya | | Rasio | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5=3/4) | |
| 1 | | Kabupaten .... | |  | |  | |  | |
| 2 | | Kabupaten ...... | |  | |  | |  | |
| 3 | | Dst ..... | |  | |  | |  | |
| 4 | | Kota .... | |  | |  | |  | |
| 5 | | Dst ...... | |  | |  | |  | |
|  | | Jumlah | |  | |  | |  | |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Luas Wilayah Industri

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah Industri |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + - 1. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Luas Wilayah Kebanjiran Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah Kebanjiran |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Luas Wilayah Kebanjiran

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | Kabupaten/kota | | Luas Wilayah Kebanjiran | | Luas Seluruh Wil. Budidaya | | Rasio | |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5=3/4) | |
| 1 | | Kabupaten .... | |  | |  | |  | |
| 2 | | Kabupaten ...... | |  | |  | |  | |
| 3 | | Dst ..... | |  | |  | |  | |
| 4 | | Kota .... | |  | |  | |  | |
| 5 | | Dst ...... | |  | |  | |  | |
|  | | Jumlah | |  | |  | |  | |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Luas Wilayah Kebanjiran

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah Kebanjiran |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + - 1. Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Luas Wilayah Kekeringan

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah Kekeringan |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Luas Wilayah Kekeringan

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | Kabupaten/kota | | Luas Wilayah Kekeringan | | Luas Seluruh Wil. Budidaya | | Rasio | |
| (1) | | (2) | | (3) | | (4) | | (5=3/4) | |
| 1 | | Kabupaten .... | |  | |  | |  | |
| 2 | | Kabupaten ...... | |  | |  | |  | |
| 3 | | Dst ..... | |  | |  | |  | |
| 4 | | Kota .... | |  | |  | |  | |
| 5 | | Dst ...... | |  | |  | |  | |
|  | | Jumlah | |  | |  | |  | |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Luas Wilayah Kekeringan

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah Kekeringan |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* + - 1. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Untuk Provinsi:

Persentase Luas Wilayah Perkotaan

Tahun .... s.d ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Luas Wilayah Perkotaan |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Persentase Luas Wilayah Perkotaan

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Luas Wilayah Perkotaan | Luas Seluruh Wil. Budidaya | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Rasio Luas Wilayah Perkotaan

Tahun .... s.d ....

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | n-5 | n-4 | n-3 | n-2 | n-1 |
| 1. | Luas Wilayah Perkotaan |  |  |  |  |  |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya |  |  |  |  |  |
| 3. | Rasio (1./2.) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

1. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk Provinsi:

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sektor | Jumlah | | | | | | | | | |
| (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| 1. | Bank Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | BPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/kota | Bank Umum | | BPR | |
| Konvensional | Syariah | Konvensional | Syariah |
| 1. | Kabupaten .... |  |  |  |  |
| 2. | Kabupaten ...... |  |  |  |  |
| 3. | Dst ..... |  |  |  |  |
| 4. | Kota .... |  |  |  |  |
| 5. | Dst ...... |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sektor | Jumlah | | | | | | | | | |
| (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| 1. | Bank Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | BPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi).Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Untuk Provinsi:

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya

Provinsi.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sektor | Jumlah | | | | | | | | | |
| (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| 1. | Perusahaan Asuransi Kerugian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Perusahaan Asuransi Jiwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan cabangnya

Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....

Provinsi .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kabupaten/Kota | Persh. Asuransi Kerugian | | Persh. Asuransi Jiwa | |
| Konvensional | Syariah | Konvensional | Syariah |
| 1 | Kabupaten .... |  |  |  |  |
| 2 | Kabupaten ...... |  |  |  |  |
| 3 | Dst ..... |  |  |  |  |
| 4 | Kota .... |  |  |  |  |
| 5 | Dst ...... |  |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai nama daerah berkenaan.

Untuk kabupaten/kota:

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya

Kabupaten/Kota.....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sektor | Jumlah | | | | | | | | | |
| (n-5) | | (n-4) | | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)\*\*) | |
| 1. | Perusahaan Asuransi Kerugian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Perusahaan Asuransi Jiwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Konvensional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Ketersediaan air bersih
2. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

**Air Bersih**(clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

**Air Minum**(drinking water) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sumber air bersih dapat dibedakan atas:

1. Air Hujan
2. Air Sungai dan Danau
3. Mata Air
4. Air Sumur Dangkal
5. Air Sumur Dalam

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Sajikan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih dalam tabel sebagai berikut:

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

| No | Sumber Air Bersih | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Leding (Perpipaan) |  |  |  |  |  |
| 2. | Sumur Lindung |  |  |  |  |  |
| 3. | Sumur Tidak Terlindung |  |  |  |  |  |
| 4. | Mata Air Terlindung |  |  |  |  |  |
| 5. | Mata Air Tidak Terlindung |  |  |  |  |  |
| 6. | Sungai |  |  |  |  |  |
| 7. | Danau/Waduk |  |  |  |  |  |
| 8. | Air Hujan |  |  |  |  |  |
| 9. | Air Kemasan |  |  |  |  |  |
| 10. | Lainnya |  |  |  |  |  |
| 11. | Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih |  |  |  |  |  |
| 12. | Jumlah Rumah Tangga |  |  |  |  |  |
| 13. | Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Fasilitas listrik dan telepon
2. Rasio ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Perhitungan ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya kedepan dapat mengacu pada dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) atau Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang telah disusun.

Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

| NO | Uraian | Satuan | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kebutuhan | GWH |  |  |  |  |  |
|  | - rumah tangga | GWH |  |  |  |  |  |
|  | - Komersial | GWH |  |  |  |  |  |
|  | - Public | GWH |  |  |  |  |  |
|  | - Industri | GWH |  |  |  |  |  |
|  | Susut & Losses (T&D) | % |  |  |  |  |  |
|  | Susut Pemakaian Sendiri | % |  |  |  |  |  |
|  | Total Susut & Losses | % |  |  |  |  |  |
|  | Faktor Beban | % |  |  |  |  |  |
|  | Produksi | GWH |  |  |  |  |  |
|  | Beban Puncak | MW |  |  |  |  |  |
|  | Kapasitas Terpasang (Existing) | MW |  |  |  |  |  |
|  | Cummulated Commited Projects | MW |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL KAPASITAS SISTEM | MW |  |  |  |  |  |
|  | DAYA YANG DIBUTUHKAN\* | MW |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | RT dengan daya 450 watt |  |  |  |  |  |
| 2. | RT dengan daya 900 watt |  |  |  |  |  |
| 3. | RT dengan daya 1.300 watt |  |  |  |  |  |
| 4. | RT dengan daya 2.200 watt |  |  |  |  |  |
| 5. | RT dengan daya > 2.200 watt |  |  |  |  |  |
| 6. | Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik |  |  |  |  |  |
| 7. | Jumlah Rumah Tangga |  |  |  |  |  |
| 8. | Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi.

Sajikan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan HP/Telepon dalam tabel sebagai berikut:

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Penduduk yang memiliki HP |  |  |  |  |  |
| 2. | Penduduk yang memiliki telepon PSTN |  |  |  |  |  |
| 3. | Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2) |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 5. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Ketersediaan restoran
2. Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun (n-5) | | Tahun (n-1)\*\*) | |
| Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi |
| 1. | Usaha restoran golongan tertinggi |  |  |  |  |
| 2. | Usaha restoran golongan menengah |  |  |  |  |
| 3. | Usaha restoran golongan terendah |  |  |  |  |
| 4. | Usaha rumah makan kelas A |  |  |  |  |
| 5. | Usaha rumah makan kelas B |  |  |  |  |
| 6. | Usaha rumah makan kelas C |  |  |  |  |
| 7. | Usaha rumah makan kelas D |  |  |  |  |
| 8. | Usaha rumah makan kelas |  |  |  |  |
| 9. | Jenis Usaha Restoran |  |  |  |  |
| 10. | Jenis Usaha Rumah Makan |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

1. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

1. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

1. Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

| No | Jenis Penginapan/Hotel | Tahun (n-5) | | | Tahun (n-1)\*\*) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur |
| 1. | Hotel Bintang 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hotel Bintang 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hotel Bintang 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hotel Bintang 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hotel Bintang 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Total Jumlah penginapan/Hotel |  |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* 1. Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan ketertiban
2. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Angka Kriminalitas

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

| No | Jenis Kriminal | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah kasus Narkoba |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Kejahatan Seksual |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah kasus Penganiayaan |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah kasus Pencurian |  |  |  |  |  |
| 6. | Jumlah kasus Penipuan |  |  |  |  |  |
| 7. | Jumlah kasus Pemalsuan uang |  |  |  |  |  |
| 8. | Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun |  |  |  |  |  |
| 9. | Jumlah Penduduk |  |  |  |  |  |
| 10. | Angka Kriminalitas (8)/(9) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun.

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan [protes](http://id.wikipedia.org/wiki/Protes) yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik) oleh [kepentingan kelompok](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan_kelompok).

Jumlah Demonstrasi

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1 | Bidang Politik |  |  |  |  |  |
| 2 | Ekonomi |  |  |  |  |  |
| 3 | Kasus pemogokan kerja |  |  |  |  |  |
| 4 | Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Lama Proses Perijinan

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Lama mengurus  (hari) | Jumlah persyaratan (dokumen) | Biaya resmi  (rata-rata maks Rph) |
| 1. | SIUP |  |  |  |
| 2. | TDP |  |  |  |
| 3. | IUI |  |  |  |
| 4. | TDI |  |  |  |
| 5. | IMB |  |  |  |
| 6. | HO |  |  |  |

1. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

Yang Mendukung Iklim Investasi

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Pajak yang dikeluarkan |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Retribusi yang dikeluarkan |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Perda terkait perijinan |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

1. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

1. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Desa Swasembada

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Desa/Keluarahan Swakarya |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Desa/Keluarahan Swasembada |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3) |  |  |  |  |  |
| 5. | Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

* 1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Lulusan S1/S2/S3

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah lulusan S1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah lulusan S2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah lulusan S3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Julah lulusan S1/S2/S3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jumlah penduduk |  |  |  |  |  |
| 6. | Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

1. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency* *ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency* *ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) | (n-1)\*\*) |
| 1. | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun |  |  |  |  |  |
| 3. | Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun |  |  |  |  |  |
| 5. | Rasio ketergantungan (3) / (4) |  |  |  |  |  |

\*) Diisi sesuai dengan nama daerah berkenaan.

\*\*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**GAMAWAN FAUZI**